

PEMBANGUNAN BERWAWASAN BUDAYA DI KOTA DENPASAR

Dewa Putu Suamba¹, Edi Nurdiantoro²

¹ Jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

² Jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembangunan infrastruktur di Kota Denpasar, dampak pembangunan terhadap alih fungsi lahan, dan pembangunan berwawasan budaya di Kota Denpasar. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan deskripsi secara rinci mengenai karakteristik objek wisata kajian. Hasil dari kajian tersebut adalah. Kota Denpasar adalah salah satu kota yang merupakan pusat perkembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat di Bali, dengan tingkat perkembangan sarana transportasi yang sangat tinggi. Upaya penambahan panjang jalan di Kota Denpasar belum dapat memecahkan permasalahan transportasi dalam kota secara optimal, bahkan menambah permasalahan lain yang memberikan pengaruh-pengaruh bagi tata ruang fisik kota, terutama pada penggunaan lahan (land use) dan morfologi kota Atas dasar pertimbangan ekonomi atau finansial, banyak lahan-lahan pertanian dikonversi menjadi penggunaan non pertanian (pemukiman, perkantoran, dan sarana lainnya). Penurunan luas lahan pertanian khususnya sawah menjadi penggunaan non pertanian seperti pemukiman tentu akan menimbulkan berbagai konsekuensi ekologis, di antaranya menurunkan ruang terbuka hijau dan berkurangnya daerah resapan air hujan. Peranan sektor-sektor yang lain seperti sektor pariwisata, seni dan budaya sangat menunjang laju pertumbuhan pembangunan di Kota Denpasar apalagi Kota Denpasar mencanangkan diri sebagai Kota berwawasan budaya. Dengan sendirinya peningkatan dan pelestarian budaya perlu dipertahankan.

Keywords:

*Pembangunan,
Berwawasan, Budaya,
Denpasar*

1. Pendahuluan

Kota Denpasar yang dahulu hanya sebagai wilayah karesidenan di bagian selatan Pulau Bali, kini telah berkembang menjadi kota besar. Apa yang menyebabkan Kota Denpasar dapat berkembang pesat hingga dapat dikatakan kota besar saat ini? Pertama, cikal bakal Kota Denpasar merupakan daerah penghubung daerah barat bagian selatan Pulau Bali dan daerah timur bagian selatan Pulau Bali. Sehingga Kota Denpasar letaknya strategis secara ekonomi. Kedua, laju urbanisasi yang meningkat pasca Puputan Badung, meningkat pada tahun 1970-an, dan tahun 1990-an. Ketiga, dua faktor di atas menjadikan Denpasar semakin banyak memiliki faktor pemikat, yang muncul dan dimunculkan terutama oleh praktek-praktek modernisasi (nasionalisasi) dalam berbagai aspek kehidupan. Pada akhirnya mendorong masyarakat di luar Denpasar menikmati bersama arus kehidupan modern, dengan dalih utama mengubah kehidupan untuk menjadi lebih baik (Nyoman Wijaya, 2001) Setelah status Denpasar menjadi kota besar, akan lebih banyak masalah yang dihadapinya. Pertama, penataan ruang kota yang didesain untuk menghadapi modernisasi, bertambahnya penduduk, dan citra pariwisata Bali yang terkenal. Kedua, masalah kependudukan, baik urbanisasi maupun limpahan penduduk transmigrasi dari

daerah lain beserta perangkat aturannya yang selalu menjadi masalah sosial utama kota besar. Ketiga, masalah lingkungan yang sering dihadapi seperti sampah, kualitas udara, sumber air yang layak untuk kehidupan, kebutuhan konsumsi bahan bakar, listrik dan pemukiman yang layak.

Permasalahan pembangunan yang timbul di kota Denpasar diantaranya masalah alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman, kemacetan lalu lintas, sampah yang menimbulkan rawan bencana banjir. Konsumsi penduduk dimungkinkan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, artinya dimungkinkan pula volume dan keragaman sampah yang dihasilkan juga meningkat. Jika Kota Denpasar hanya mengandalkan kesadaran masyarakatnya sepenuhnya, mungkin suatu hal yang sulit terwujud. Maka tumpuan harapan terbesar untuk mengelola dan mengolah sampah hanya pada lembaga-lembaga pemerintah, lembaga swasta atau lembaga kemasyarakatan yang peduli menangani sampah. Persoalan menangani sampah di Kota Denpasar tidak hanya soal mengumpulkan, mengangkut, memisahkan jenis sampah dan didaur ulang kembali, tetapi juga terus menerus menggugah kesadaran masyarakat yang sudah terlanjur sibuk dengan urusan ekonomi baik lewat dharma wacana, khutbah-khutbah, media massa, dan tokoh-tokoh masyarakat yang langsung terjun menangani sampah. Jika ingin Kota Denpasar kembali menjadi kota budaya, tetapi dengan bentuk yang disesuaikan dengan zamannya, maka seluruh komponen masyarakat Kota Denpasar harus bekerja sama, bekerja bersama-sama dalam menangani masalah sampah. Sinergi kesadaran masyarakat dan kerja keras di lapangan yang dilakukan lembaga yang peduli terhadap persoalan sampah memungkinkan Kota Denpasar menjadi kota budaya. Adapun tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pembangunan infrastruktur di Kota Denpasar.
2. Mengetahui dampak pembangunan terhadap alih fungsi lahan di Kota Denpasar.
3. Mengetahui arahan pembangunan berwawasan budaya di Kota Denpasar.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memberikan gambaran secara rinci mengenai objek wisata lokasi penelitian dengan mengacu pada hasil literasi referensi yang memiliki keterkaitan dengan topik kajian dan observasi langsung pada lokasi penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Pembangunan Infrastruktur di Kota Denpasar

Menurut Wikipedia Kota Denpasar berada pada ketinggian 0-75 meter dari permukaan laut, terletak pada posisi 8°35'31" sampai 8°44'49" Lintang Selatan dan 115°00'23" sampai 115°16'27" Bujur Timur. Sementara luas wilayah Kota Denpasar 127,78 km² atau 2,18% dari luas wilayah Provinsi Bali. Dari penggunaan tanahnya, 2.768 Ha merupakan tanah sawah, 10.001 Ha merupakan tanah kering dan sisanya seluas 9 Ha adalah tanah lainnya. Tingkat curah hujan rata-rata sebesar 244 mm per bulan, dengan curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember. Sedangkan suhu udara rata-rata sekitar 29.8° C dengan rata-rata terendah sekitar 24.3° C. Sungai Badung merupakan salah satu sungai yang membelah Kota Denpasar, sungai ini bermuara di Teluk Benoa. Kota Denpasar adalah salah satu kota yang merupakan pusat perkembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat di Bali, dengan tingkat perkembangan sarana transportasi yang sangat tinggi. Menurut Wikipedia prosentase jumlah penambahan kendaraan bermotor tiap tahunnya (29,2%) tidak sebanding dengan daya dukung jaringan infrastruktur terutama jaringan jalan (4,68%), sehingga hal ini menimbulkan kemacetan lalu lintas pada ruas-ruas jalan utama kota Denpasar. Pemerintah kota mengupayakan solusi untuk mengatasi masalah ini antara lain dengan membangun jalan lingkar baru di luar pusat kota Denpasar. Upaya penambahan panjang jalan di Kota Denpasar belum dapat memecahkan permasalahan transportasi dalam kota secara optimal, bahkan menambah permasalahan lain yang memberikan pengaruh-pengaruh bagi tata ruang fisik kota, terutama pada penggunaan lahan (land use) dan morfologi kota.

Pembangunan pariwisata berpengaruh kuat terhadap perubahan struktur dan peningkatan perekonomian di Kota Denpasar. Namun struktur perekonomian Kota Denpasar sedikit berbeda bila dibandingkan dengan struktur perekonomian Provinsi Bali pada umumnya, dengan menempatkan sektor perdagangan, hotel dan restoran mendominasi pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Denpasar. Ikut pula mendongkrak ekonomi Kota Denpasar adalah produksi barang kerajinan berupa barang kerajinan untuk cinderamata, seperti ukiran dan patung. Namun industri kerajinan ini tengah mengalami tekanan, selain karena dampak krisis dan persaingan antar daerah, tekanan lain berasal dari persaingan antar negara berkembang Asia lainnya seperti Vietnam, Thailand, India, Malaysia dan Cina. Negara pesaing ini lebih memaksimalkan besarnya skala produksi dengan memanfaatkan teknologi industri, sedangkan di Kota Denpasar industri kerajinan ini masih mempertahankan keterampilan tangan (*hand made*) sehingga menjadi kendala pada pemenuhan kuantitas produksinya.

Perkembangan pariwisata dan daya tarik pulau Bali, secara tidak langsung telah mendorong kemajuan pembangunan di Kota Denpasar. Pada tahun 2000, jumlah wisatawan mancanegara yang datang berkunjung mencapai 1.413.513 orang, dan menempatkan jumlah wisatawan terbanyak dari Jepang kemudian disusul dari Australia, Taiwan, Eropa, Inggris, Amerika, Singapura dan Malaysia. Kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Denpasar menitikberatkan pada pariwisata budaya berwawasan lingkungan. Sebagai salah satu sentra pengembangan pariwisata, Kota Denpasar menjadi barometer bagi kemajuan pariwisata di Bali, hal ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai hotel berbintang sebagai sarana menunjang aktifitas pariwisata tersebut. Pantai Sanur merupakan salah satu kawasan wisata pantai yang ramai dikunjungi. Sementara Lapangan Puputan merupakan kawasan ruang terbuka hijau di Kota Denpasar sekaligus berfungsi sebagai *paru-paru* kota. Secara administratif pemerintahan kota ini terdiri dari 4 kecamatan, 43 desa atau kelurahan dengan 209 dusun. Saat ini pemerintah Kota Denpasar telah mengembangkan berbagai inovasi dalam meningkatkan layanan kepada masyarakatnya, di antara mulai membenahi sistem administrasi kependudukannya

Kota Denpasar telah memiliki sarana pelayanan kesehatan yang baik di Provinsi Bali, terdapat 3 rumah sakit milik pemerintah diantaranya RSUP Sanglah Denpasar, RSUD Wangaya dan RSAD Udayana serta 13 buah rumah sakit swasta. Sementara dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya, pemerintah Kota Denpasar telah membangun 10 buah Puskesmas dan 26 buah puskesmas pembantu, dengan rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah 1,7. Di Kota Denpasar telah berdiri beberapa perguruan tinggi diantaranya Institut Seni Indonesia Denpasar. Untuk melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Denpasar, dilayani oleh PDAM Kota Denpasar, dan sampai tahun 2003 telah dapat melayani 64,82 % penduduknya. Sumber air baku PDAM Kota Denpasar adalah air permukaan dan sumur dalam yang pengolahannya menggunakan Instalasi Pengolahan Air Lengkap (IPAL). Sedangkan sistem pengalirannya menggunakan sistem gravitasi dan pemompaan. Dalam penanganan masalah sampah, pemerintah Kota Denpasar memanfaatkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan seluas 40 Ha. Dari data tahun 2002, jumlah timbulan sampah Kota Denpasar adalah sebanyak 127.750 m³, sebagian besar adalah sampah domestik yang mencapai 71,14 %. Namun volume sampah yang telah tertangani baru sebanyak 1.904 m³, sehingga banyaknya sampah yang belum terlayani adalah 125.846 m³ atau 98,5 %. Mengatasi hal tersebut pemerintah kota dengan masyarakat menerapkan sistem swakelola guna mengatasi masalah penumpukan sampah di TPA tersebut.

Pelabuhan Benoa merupakan pintu masuk ke Kota Denpasar melalui jalur laut dan saat ini dikelola oleh PT Pelindo III.]Pelabuhan ini berada sekitar 10 km dari pusat kota, dan telah beroperasi sejak dari tahun 1924. Sarana transportasi darat di Kota Denpasar terutama untuk angkutan kota saat ini sudah mulai tidak efektif dan efisien, sampai tahun 2010 hanya 30 % yang masih beroperasi, seiring dengan berkurangnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan tersebut, yang diperkirakan hanya sekitar 3 % dari total jumlah penduduknya. Sementara pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi terus meningkat menjadi 11 % per tahunnya, dan tidak sebanding dengan pembangunan jalan baru. Sehingga terjadi kemacetan di Kota Denpasar tidak dapat dihindari. Klub utama sepakbola Persedan Denpasar merupakan klub

sepakbola kebanggaan masyarakat Kota Denpasar, dan menjadikan Stadion Ngurah Rai sebagai markas dan tempat pertandingan laga kandang.

Sementara seni dan budaya di Kota Denpasar secara garis besar identik dengan seni dan budaya Bali umumnya, walau di sini telah terjadi interaksi perpaduan dengan budaya lain seiring dengan kedatangan para wisatawan dari berbagai kalangan. Namun nilai tradisional yang dijiwai oleh ritual-ritual agama Hindu masih kental mewarnai kota ini. Peranan Adat Bali masih mengakar pada masyarakat Kota Denpasar, Adat Bali yang dimaksud meliputi, nilai, norma dan perilaku dalam masyarakat umumnya pada sistem kekeluargaan patrilineal. Namun seiring zaman beberapa hukum adat yang berlaku mulai dipertentangkan oleh masyarakatnya, terutama dalam masalah gender dan pewarisan.

Pemerintah Kota Denpasar memiliki stasiun radio penyiaran, bernama RPKD (Radio Pemerintah Kota Denpasar) yang didirikan tahun 2002, pada frekuensi 91.45 FM. Radio ini ditujukan kepada layanan informasi lalu lintas guna menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan di Kota Denpasar. Bali TV merupakan stasiun TV swasta di Kota Denpasar, dan masih satu kelompok usaha dengan Bali Post, Denpasar Post, dan Radio Global. Beberapa surat kabar yang menjadikan Kota Denpasar sebagai pusat penerbitannya antara lain Radar Bali dan Warta Bali. Sementara beberapa stasiun radio penyiaran yang ada di kota ini antara lain Radio Gema Merdeka, Radio Aneka Rama dan sebagainya. Sebagai bagian dari Indonesia, Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali juga sangat rawan terhadap bencana baik yang diakibatkan oleh alam, non alam maupun ulah manusia. Secara demokratis jumlah penduduk yang besar dibandingkan dengan luas wilayah menjadikan Kota Denpasar sebagai Kota yang padat dan sangat heterogen. Menurut data yang ada saat ini ada lebih kurang 27 etnis/suku yang ada di Kota Denpasar. Heterogenitas ini bisa juga menjadi ancaman baik dalam skala kecil maupun besar dan dapat mengganggu kondusifitas wilayah jika tidak dikelola dengan baik. Kasus-kasus yang terjadi di Poso, Maluku, Sampit dan berbagai daerah lain di Indonesia harus dijadikan sebagai pelajaran yang berharga. Masalah premanisme juga patut dicermati sehingga kondusifitas wilayah akan tetap terjaga. Secara geografis dan demografis, Kota Denpasar sering mengalami bencana seperti banjir, gempa bumi baik vulkanik maupun tektonik, tsunami, erosi/abraasi pantai, angin kencang, tanah longsor, kebakaran, pencemaran lingkungan, konflik sosial, terorisme dan wabah penyakit. Dilain pihak asset-aset berupa sumber daya manusia dan sarana prasarana Kota Denpasar perlu dilindungi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman sekaligus meningkatkan daya tahan terhadap ancaman dan resiko bencana. Penetapan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pada tanggal 26 April 2007 diharapkan mampu menutupi segala kelemahan tersebut, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara optimal.

Implikasi terbentuknya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah berupa perubahan paradigma penanggulangan terhadap bencana dari responsif menjadi penekanan pada proses mitigasi sehingga "Mindset" para pelaksana pembangunan diharapkan membuat perencanaan pembangunan yang berwawasan aman bencana. Implikasi lain adalah bahwa setiap Pemerintah Kabupaten / Kota / Provinsi diharapkan mengkaji lagi secara holistic program-program pembangunan yang dilakukan selama ini misalnya sistim tata ruang, dan lain-lain. Sebagai bagian dari kewajiban terhadap Undang-undang tersebut, maka Pemerintah Kota juga telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Denpasar yang diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 4 Desember 2008. Lembaga baru ini diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menangani kebencanaan dalam arti luas sehingga Lembaga teknis lain seperti Pemadam Kebakaran (PMK) dilikuidasi dan masuk di dalamnya. Rencana Strategis (Renstra) pun harus dibuat untuk dipedomani selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD).

B. Alih Fungsi Lahan Sebagai Dampak Pembangunan di Kota Denpasar

Pesatnya pembangunan di berbagai bidang dan semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Denpasar dari tahun ke tahun menyebabkan semakin banyaknya kebutuhan lahan baik untuk kebutuhan pembangunan di berbagai sektor maupun untuk tempat tinggal. Oleh karena itu, terjadi perebutan penggunaan lahan terutama di sektor pertanian dan non pertanian. Atas dasar pertimbangan ekonomi atau finansial, banyak lahan-lahan pertanian dikonversi menjadi penggunaan non pertanian (pemukiman, perkantoran, dan sarana lainnya). Penurunan luas lahan pertanian khususnya sawah menjadi penggunaan non pertanian seperti pemukiman tentu akan menimbulkan berbagai konsekuensi ekologis, di antaranya menurunkan ruang terbuka hijau dan berkurangnya daerah resapan air hujan. Dampak dari penurunan ruang terbuka hijau adalah meningkatnya kadar CO₂ di udara sehingga temperatur udara di Kota Denpasar menjadi semakin panas. Sementara berkurangnya daerah resapan akan berakibat terjadinya banjir karena sebagian besar air hujan akan mengalami *run-off* dibandingkan dengan yang terinfiltrasi ke dalam tanah. Berkurangnya potensi air tanah juga merupakan konsekuensi dari berkurangnya daerah resapan air hujan. Pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun di satu sisi memerlukan ketersediaan sumber daya lahan yang semakin banyak. Sementara di sisi lain, pertambahan jumlah penduduk sendiri akan menurunkan kualitas dan kuantitas sumberdaya lahan tersebut serta berbagai konsekuensi yang ditimbulkan. Hal ini dapat menimbulkan krisis ekologis apabila tidak ditangani secara serius, sistematis, dan berkesinambungan. Dalam hubungannya dengan pemanfaatan dan konservasi lahan terutama lahan pertanian ke non pertanian khususnya pemukiman, respon Pemerintah Kota Denpasar yang telah diambil adalah menutup izin pembangunan perumahan. Mempercepat perizinan dalam pembuatan bangunan dengan melengkapi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sehingga eksekusi yang ditimbulkan dari perubahan fungsi lahan tersebut dapat ditangani dengan baik. Dari 8 jenis penggunaan lahan yang ada di Kota Denpasar, penggunaan lahan sawah dan pemukiman merupakan 2 penggunaan lahan yang selalu mengalami perubahan setiap tahun. Sementara penggunaan lahan yang lain tidak selalu mengalami perubahan dan perubahan yang terjadi pun tidak terlalu signifikan.

Penggunaan lahan sawah dari tahun ke tahun mengalami pengurangan, sedangkan pemukiman terus mengalami peningkatan. Perubahan luasan sawah dan pemukiman dari tahun 2001 sampai tahun 2007 selalu mengalami fluktuasi. Penurunan jumlah sawah dan peningkatan jumlah pemukiman paling drastis terjadi dari tahun peralihan tahun 2001 dan 2002. Pada kisaran waktu tersebut terjadi penurunan luas sawah sebesar 149 ha atau 4,92%. Sementara luas pemukiman meningkat sebesar 293 ha atau 3,98%. Perubahan luas sawah dan pemukiman yang cukup signifikan juga terjadi pada kisaran tahun 2005 dan 2006. Luas sawah pada selang waktu tersebut mengalami penurunan sebanyak 51 ha (1,84%), sedangkan pemukiman bertambah sebesar 117 ha (1,52%). Sementara pada selang waktu 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, dan 2006/2007, penurunan luas sawah per tahun masing-masing 26 ha (0,90%), 42 ha (1,47%), 46 ha (1,63%), dan 10 ha (0,37%), sedangkan peningkatan luas pemukiman per tahun pada kurun waktu yang sama berturut-turut 17 ha (0,22%), 11 ha (0,14%), 35 ha (0,46%), dan 16 ha (0,20%). Terjadinya perubahan penggunaan lahan secara umum dapat disebabkan karena adanya perubahan rencana tata ruang wilayah, adanya kebijaksanaan arah pembangunan dan karena mekanisme pasar. Pada masa lampau yang terjadi adalah lebih banyak karena dua hal yang terakhir, karena kurangnya pengertian masyarakat maupun aparat pemerintah mengenai tata ruang wilayah, atau rencana tata ruang wilayah yang sulit diwujudkan. Sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan yang menekankan kepada aspek pertumbuhan melalui kemudahan fasilitas investasi, baik kepada investor lokal maupun luar negeri dalam penyediaan tanahnya, maka perubahan penggunaan tanah dari pertanian ke nonpertanian terjadi secara meluas. Secara khusus, lahan yang paling rentan terhadap alih fungsi adalah sawah. Hal tersebut telah dirasakan oleh Kelurahan Panjer, yang terletak di wilayah selatan Kota Denpasar. Beberapa faktor yang mendorong perubahan penggunaan lahan sawah Kelurahan Panjer antara lain:

1. *Ketersediaan agroekosistem dominan sawah* Kepadatan penduduk di Kelurahan Panjer pada tahun 1980-an yang mempunyai agroekosistem dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan agroekosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih tinggi seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut perkembangan bidang infrastruktur.

2. *Daerah pesawahan Panjer yang lokasinya berada di daerah perkotaan* Seperti yang kita ketahui bersama, Kelurahan Panjer adalah salah satu Kelurahan yang terletak di Kota Denpasar, tepatnya di Kecamatan Denpasar Selatan. Seiring dengan perkembangan Kota Denpasar, Kelurahan Panjer yang termasuk salah satu bagian wilayahnya pun mendapatkan imbasnya. Maka terjadilah peralihan lahan sawah menjadi lahan non sawah secara besar-besaran di kawasan ini yang tercatat dimulai pada tahun 1990an.

3. *Kelurahan Panjer yang terletak di daerah bertopografi datar* Pembangunan prasarana dan sarana, kawasan industri, dan sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar, dimana pada wilayah dengan topografi seperti itu ekosistem pertaniannya dominan areal persawahan. Jika ditinjau dari topografi, keadaan medan Kota Denpasar secara umum miring ke arah selatan dengan ketinggian berkisar antara 0-75 meter di atas permukaan laut. Keadaan topografi yang strategis ini sangat mendukung terjadinya pembangunan di kawasan ini dan terjadilah peralihan lahan persawahan di Kelurahan Panjer.

4. *Lemahnya peraturan perundang-undangan alih fungsi lahan* Beberapa peraturan perundang-undangan alih fungsi lahan pertanian yang ada memiliki berbagai kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain: a. Obyek lahan pertanian yang dilindungi dari proses alih fungsi ditetapkan berdasarkan kondisi fisik lahan, padahal kondisi fisik lahan tersebut relative mudah direkayasa, sehingga alih fungsi lahan dapat berlangsung tanpa melanggar peraturan yang berlaku. b. Peraturan yang ada cenderung bersifat himbauan dan tidak dilengkapi sanksi yang jelas, baik yang menyangkut dimensi maupun pihak yang dikenai sanksi. c. Jika terjadi alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sulit ditelusuri pihak mana yang paling bertanggung jawab, mengingat izin alih fungsi lahan merupakan keputusan kolektif berbagai instansi. d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku kadangkala bersifat paradoksal dan dualistik. Di satu sisi bermaksud untuk melindungi alih fungsi lahan sawah, namun di sisi lainnya pemerintah cenderung mendorong pertumbuhan industri yang basisnya membutuhkan lahan. 5. *Kurangnya keterlibatan petani Panjer* Belum banyak dilibatkannya petani sebagai pemilik lahan dan pelaku dalam kelembagaan lokal secara aktif dalam berbagai upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Hal ini akan mendorong ketimpangan persepsi antara kedua pihak yang terlibat, sehingga akan memperbesar kecenderungan alih fungsi lahan oleh salah satu pihak. 6. Belum terbangunnya komitmen, perbaikan sistem koordinasi, dan pengembangan kompetensi lembaga-lembaga formal dalam menangani alih fungsi lahan pertanian Kelurahan Panjer.

C. Arahan Pembangunan Berwawasan Budaya di Kota Denpasar

Pembangunan Kota Denpasar diarahkan untuk tetap mempertahankan tingkat laju pertumbuhan perekonomian yang tinggi serta meningkatkan pemerataannya dengan struktur perekonomian yang mantap. Peranan sektor-sektor yang lain seperti sektor pariwisata, seni dan budaya sangat menunjang laju pertumbuhan pembangunan di Kota Denpasar apalagi Kota Denpasar mencanangkan diri sebagai Kota berwawasan budaya. Dengan sendirinya peningkatan dan pelestarian budaya perlu dipertahankan. Kota Denpasar merupakan daerah yang memiliki potensi yang cukup tinggi di bidang kepariwisataan dengan didukung oleh kondisi alam, kondisi sosial budaya, serta dunia usaha. Kota Denpasar merupakan Kota Serba Sentra serta sebagai Ibu Kota Propinsi Bali. Dalam pengembangan Pembangunan Kepariwisata di Kota Denpasar masih terdapat beberapa kendala seperti masalah kemacetan lalu lintas, kependudukan, kebersihan, dan ketertiban umum. Di samping itu pula belum terkelolanya secara baik sebagian obyek wisata dan dukungan kekhasan daerah sebagai daya tarik wisatawan. Namun demikian, pembangunan kepariwisataan merupakan hal yang mendapat perhatian dan disiasati agar pembangunan Kepariwisata Kota Denpasar yang merupakan sektor andalan dan unggulan mampu mewujudkan pariwisata peduli rakyat. Pembangunan Kota Denpasar yang berwawasan budaya adalah pembangunan seluruh aspek, bidang dan sektor kehidupan kota secara holistik, terpadu dan berkelanjutan yaitu dengan menempatkan kebudayaan Bali yang dijiwai agama Hindu sebagai potensi dasar yang melandasi segala gerak dan langkah pembangunan, melalui proses dan cara yang arif, partisipatif dan bersandarkan moral, etika dan manusiawi serta untuk

mewujudkan kesejahteraan lahir bathin yang berlandaskan jati diri, kualitas dan keharkatan dalam segenap kehidupan manusia dan masyarakat. Wawasan budaya menempatkan kebudayaan dalam kategori dasar atau asasi yaitu berfungsi sebagai potensi dasar, cara/pendekatan serta sebagai tujuan. Sebagai potensi dasar unsur-unsur kebudayaan Bali bersifat khas, unggul dan menyiratkan nilai-nilai luhur yang sangat perlu dikedepankan. Unsur-unsur tersebut mencakup : Pura, Puri, Arsitektur Bali, Kesenian Daerah, Upacara, Hukum Adat, konsepsi-konsepsi budaya serta unsur-unsur yang lainnya.

Sedangkan sebagai cara atau pendekatan, terkristalisasi bahwa hakikat pendekatan kebudayaan mengutamakan hal-hal yang prinsipil seperti menghormati kebersamaan, menghargai segala bentuk pendapat. Secara singkat cara atau pendekatan yang dimaksud harus mengutamakan subjektifitas, partisipatif, objektivitas serta dilandasi kearifan, moral, etika secara manusiawi. Sebagai tujuan, orientasi diarahkan pada kesejahteraan yang seimbang dan serasi sesuai dengan amanat Tri Hita Karana yaitu keserasian hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Pembangunan Denpasar yang berwawasan budaya yang dilandasi Tri Hita Karana akan menghadapi berbagai hambatan diantaranya kesemrawutan tata ruang dengan kecenderungan ketersesakan yang makin tinggi yang menimbulkan tekanan ekologis yang berat terhadap kehidupan manusia, masyarakat dan kebudayaan serta kondisi kehidupan warga kota yang heterogen dan kompleks baik mengenai kepadatan demografis maupun keragaman etnis, ras dan agama. Dengan kondisi warga kota yang heterogen dan kompleks ini akan berpengaruh terhadap lingkungan Kota Denpasar. Dalam hal ini kecendrungan akan timbulnya gangguan lingkungan baik itu kebersihan, keindahan, keamanan serta keasriannya. Lingkungan yang bersih akan membawa dampak yang positif terhadap ketenangan dan kenyamanan serta keasrian lingkungan itu sendiri. Namun sebaliknya apabila lingkungan yang kotor, kumuh dan jorok akan membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Berpijak dari hal tersebut kita sebagai warga Kota Denpasar hendaknya menjaga kebersihan dan keasrian kota. Setiap orang wajib menjaga kebersihan umum, setiap sampah atau limbah harus dibuang pada tempat-tempat pembuangan sampah atau limbah yang telah ditentukan, tanpa mengurangi kewajiban di setiap perusahaan baik itu bengkel, pabrik, restoran, catering serta perusahaan lainnya untuk menyediakan bak-bak atau tangki sebagai tempat penampungan limbah perusahaan mereka menurut tata cara yang berlaku untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Begitu pula di setiap bangunan seperti rumah, kantor, hotel, sekolah maupun bangunan lainnya wajib menyediakan tempat sampah sebagai tempat penampungan sampah harian yang dihasilkannya dan bertanggung jawab atas kebersihan dari sampah-sampah yang berceceran di jalan atau halaman sekitar bangunan. Bahkan setiap pedagang tentengan ataupun bergerobak/pedagang kaki lima harus dilengkapi dengan tempat sampah yang seimbang dengan sampah yang dihasilkan setiap harinya. Di pinggir jalan ataupun ditempat-tempat keramaian umum lainnya ditempatkan kotak-kotak sampah guna menampung sampah-sampah kecil dari orang-orang yang berlalu lalang di tempat itu, yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota. Tugas mengumpulkan sampah yang ada ditempat-tempat umum dilaksanakan oleh petugas kebersihan yang selanjutnya di angkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).

5. Simpulan dan Saran

Kota Denpasar adalah salah satu kota yang merupakan pusat perkembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat di Bali, dengan tingkat perkembangan sarana transportasi yang sangat tinggi. Pemerintah kota mengupayakan solusi untuk mengatasi masalah ini antara lain dengan membangun jalan lingkar baru di luar pusat kota Denpasar . Upaya penambahan panjang jalan di Kota Denpasar belum dapat memecahkan permasalahan transportasi dalam kota secara optimal, bahkan menambah permasalahan lain yang memberikan pengaruh-pengaruh bagi tata ruang fisik kota, terutama pada penggunaan lahan (land use) dan morfologi kota. Pesatnya pembangunan di berbagai bidang dan semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Denpasar dari tahun ke tahun menyebabkan semakin banyaknya kebutuhan lahan baik untuk kebutuhan pembangunan di berbagai sektor maupun untuk tempat tinggal. Oleh

karena itu, terjadi perebutan penggunaan lahan terutama di sektor pertanian dan non pertanian. Atas dasar pertimbangan ekonomi atau finansial, banyak lahan-lahan pertanian dikonversi menjadi penggunaan non pertanian (pemukiman, perkantoran, dan sarana lainnya). Penurunan luas lahan pertanian khususnya sawah menjadi penggunaan non pertanian seperti pemukiman tentu akan menimbulkan berbagai konsekuensi ekologis, di antaranya menurunkan ruang terbuka hijau dan berkurangnya daerah resapan air hujan. Pembangunan infrastruktur jalan yang kurang menyebabkan masalah kemacetan lalu lintas yang diakibatkan oleh banyaknya kendaraan bermotor yang melebihi kapasitas jalan. Masalah sampah juga menjadi masalah yang serius di kota ini. Pembangunan Kota Denpasar diarahkan untuk tetap mempertahankan tingkat laju pertumbuhan perekonomian yang tinggi serta meningkatkan pemerataannya dengan struktur perekonomian yang mantap. Peranan sektor-sektor yang lain seperti sektor pariwisata, seni dan budaya sangat menunjang laju pertumbuhan pembangunan di Kota Denpasar apalagi Kota Denpasar mencanangkan diri sebagai Kota berwawasan budaya. Dengan sendirinya peningkatan dan pelestarian budaya perlu dipertahankan.

Masalah pembangunan sebenarnya adalah masalah lintas sektor dan lintas daerah sehingga diperlukan adanya kerjasama yang baik, sistematis, dan berkesinambungan antar dinas yang terkait dan antar pemerintah kabupaten/kota. Beberapa saran terkait dengan permasalahan pembangunan infrastruktur di kota Denpasar adalah disini peran pemerintah sangat diperlukan dalam perencanaan (planning) tata ruang kota, pengeluaran kebijakan dan penegakan peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Denpasar.

Dinas Tata Kota, 2008. Draft Laporan Identifikasi Kawasan Pemukiman Padat/Kumuh dan Pembuatan Design Engeering Detail (DED) Pemukiman Padat/Kumuh di Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Selatan, Denpasar Barat dan Denpasar Utara Kota Denpasar. Denpasar.

Pemerintah Kota Denpasar, 2008. Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Denpasar. Denpasar.